

---

**PENGARUH ALOKASI ANGGARAN BIDANG PENANGGULANGAN  
FAKIR MISKIN DAN ALOKASI ANGGARAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
TERHADAP KINERJA DINAS SOSIAL PEMERINTAHAN DAERAH SE-  
JAWA TENGAH TAHUN 2019-2022**

*M.Hussain Ismail<sup>1</sup>, Sobrotul Imtikhanah<sup>2</sup>, Tutut Dwi Andayani<sup>3</sup>,  
Asri Pangestika Lutfiani<sup>4</sup>*

*<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Akuntansi FEB Universitas Muhammadiyah Pekajangan  
Pekalongan*

*Korespondensi : [dwiandayani583@gmail.com](mailto:dwiandayani583@gmail.com)*

*Diterima : Saebani, Tanggal : 15 Oktober 2023, Direvisi : Saebani, Tanggal : 20 Oktober 2023,  
Disetujui : Tutut Dwi Andayani, Tanggal 12 November 2023*

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan Fakir Miskin dan Alokasi Anggaran Kesejahteraan Sosial terhadap Kinerja Dinas Sosial Pemerintah Daerah se-Jawa Tengah tahun 2019-2022. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling digunakan sehingga diperoleh 10 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah yang layak untuk diteliti. Pengujian dilakukan dengan analisis regresi linier sederhana menggunakan program Windows SPSS 20. Hasil uji t menunjukkan bahwa Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan Fakir Miskin tidak berpengaruh terhadap Kinerja Dinas Sosial Penanggulangan Kemiskinan, sedangkan Alokasi Anggaran Kesejahteraan Sosial berpengaruh terhadap Kinerja Dinas Sosial Peningkatan Kesejahteraan Sosial. Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa variabel kinerja Dinas Sosial Peningkatan Kesejahteraan Sosial dipengaruhi oleh Alokasi Anggaran Kesejahteraan Sosial sebesar 12,8. Hasil koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Sosial Penanggulangan Kemiskinan dipengaruhi oleh Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan fakir miskin sebesar 2,9% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan pada penelitian ini.*

**Keywords:** *Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan Fakir Miskin, Alokasi Anggaran Kesejahteraan Sosial, Kinerja Dinas Sosial*

**THE EFFECT OF BUDGET ALLOCATION IN THE FIELD OF POOR  
MANAGEMENT AND SOCIAL WELFARE BUDGET ALLOCATION ON THE  
PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENT SOCIAL SERVICES  
THROUGHOUT CENTRAL JAVA IN 2019-2022**

**Abstract**

*The study aims to determine the effect of Budget Allocation in the Poor Reduction Sector and Social Welfare Budget Allocation on the Performance of Local Government Social Services throughout Central Java in 2019-2022. This study used the purposive sampling method so that ten regencies and cities in Central Java were obtained that were worthy of research. Tests were performed with simple linear regression analysis using the Windows SPSS 20 program. The t-test results showed that the Budget Allocation for the Poverty Reduction Sector does not affect the Performance of the Social Service for Poverty Reduction. At the same time, the Social Welfare Budget Allocation affects the Performance of the Social Service for Social Welfare*

---

*Improvement. The coefficient of determination (R square) test results showed that the Social Service for Social Welfare Improvement performance variable is influenced by the Social Welfare Budget Allocation of 12.8. The results of the coefficient of determination (R Square) show that the performance of the Social Office for Poverty Reduction is influenced by the Budget Allocation for Poverty Reduction by 2.9%. In contrast, the rest is influenced by other variables not used in this study. Keywords: Budget Allocation in the Field of Poor Management, Social Welfare Budget Allocation, and Social Service Performance.*

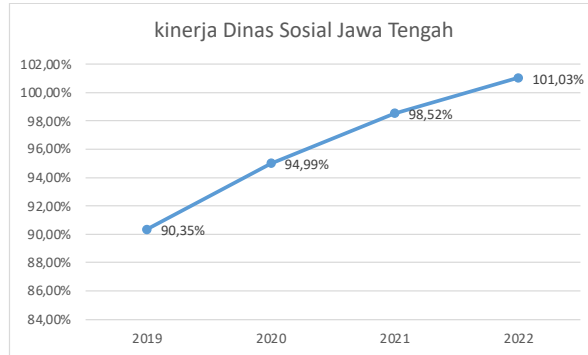
***Keywords : Allocation of the poor budget field of repatriation, social welfare budget allocation, social service performance***

## **PENDAHULUAN**

Meluasnya perkembangan bisnis beserta lingkungannya yang semakin hari semakin berubah seiring dengan fenomena globalisasi, maka juga diikuti oleh perubahan dan perkembangan teknologi, serta karakteristik sumber daya yang semakin beragam (Risgiyanti et al., 2020). Perekonomian yang lesu berkontribusi terhadap angka kemiskinan. Banyak kelompok masyarakat yang pendapatannya menurun bahkan harus kehilangan mata pencaharian (Kholidah dan Hakim, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan “Bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia no 14 tahun 2016 Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi wewenang daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Indonesia merupakan negara berkembang dengan kondisi tingkat kemiskinan dan pengangguran yang relatif tinggi, yang menjadi permasalahan di setiap struktur pemerintahan mulai dari pemerintah pusat hingga daerah terdiri dari provinsi, daerah, kabupaten, dan desa (Riswan et al., 2017). Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dilihat bersama bahwa total penduduk lebih dari 267 juta jiwa masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan (Kholidah dan Salma, 2019).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 menyatakan bahwa “Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terkandung cita-cita Negara Indonesia yaitu menghendaki agar warga negara mempunyai lapangan pekerjaan yang layak, dan tidak memiliki kehidupan dalam keadaan fakir miskin dan bebas dari keterlantaran anak-anak. Pelayanan kesejahteraan sosial untuk fakir miskin dapat dilaksanakan secara bertahap dan terus menerus. (Ais, 2022).



**Gambar 1 Grafik Kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah**

Sumber: [www.dinsos.jatengprov.go.id](http://www.dinsos.jatengprov.go.id)

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan yang sangat drastis dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Pada tahun 2019 capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebesar 90,35% yang kemudian mengalami peningkatan sebesar 4,64% menjadi 94,99%. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,53% menjadi 98,52%. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali sebesar 2,51% menjadi 101,03%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan akuntabilitas dan transparansi dengan cara menyampaikan informasi yang relevan dengan hasil kerja yang telah terlaksana kepada masyarakat.

**Tabel 1 Alokasi Anggaran Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah**

Tahun	Alokasi anggaran fakir miskin (Rp)	Alokasi anggaran kesejahteraan sosial (Rp)
2019	3.742.462.000	1.514.236.000
2020	4.383.476.320	2.500.646.000
2021	6.047.063.000	4.745.661.100
2022	9.020.400.000	7.221.100.000

Sumber: [www.dinsos.jatengprov.go.id](http://www.dinsos.jatengprov.go.id)

**Tabel 2 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah**

Provinsi	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Jawa Tengah	3.743.230	3.980.900	4.109.750	4.236.510

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan pada tahun 2019-2022, Hal ini menjadikan pertanyaan meskipun pada pelaksanaannya dinas sosial jawa tengah menunjukkan kinerja yang baik namun tingkat kemiskinan di jawa tengah masih menunjukkan kenaikan setiap tahunnya, dan adanya alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan seperti Alokasi Anggaran Bidang

---

Penanggulangan Fakir Miskin dan Alokasi Anggaran Kesejahteraan Sosial yang tinggi belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 pasal 1 ayat (4) kemiskinan yaitu kondisi ketidakmampuan yang dapat dilihat dari sisi ekonomi untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Pasal 1 ayat (5) penanggulangan kemiskinan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Pasal 1 ayat (6) pada program penanggulangan kemiskinan yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. (Jawa Tengah Gubernur, 2019). Selain itu pemerintah juga berupaya melalui berbagai macam program dengan tujuan untuk mengentaskan pengangguran dan kemiskinan, sehingga hal tersebut dapat diatasi dan kesejahteraan sosial benar-benar dapat terwujud (Suyono et al., 2016).

Berdasarkan Informasi dari <https://jatengprov.go.id> jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap penurunan pendapatan yang dialami oleh seluruh masyarakat selama pandemi Covid-19, dengan adanya penurunan pendapatan maka mereka memiliki peluang besar untuk jatuh pada kelompok penduduk miskin.

Penelitian yang dilakukan oleh Iramaya, Muhammad Guntur (2022), Kinerja Dinas Sosial dalam Penanggulangan Fakir Miskin di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan bahwa Penanggulangan Fakir Miskin berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Dinas Sosial di kabupaten Kepulauan Selayar. Penelitian yang dilakukan oleh Tio Saputa (2020), "Pengaruh Alokasi Anggaran Kemiskinan Terhadap Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa Alokasi Anggaran Kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Dinas Sosial di Kabupaten Buleleng".

Penelitian yang dilakukan oleh (Ais, 2022) yang berjudul "Pengaruh Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan Fakir Miskin Terhadap Kinerja Dinas Sosial Pada Pemerintah Daerah Se-Jawa Tengah Tahun 2018-2020" menunjukkan bahwa Anggaran Bidang Penanggulangan Fakir Miskin berpengaruh secara signifikan dengan arah negatif Terhadap Kinerja Dinas Sosial pada Pemerintahan Daerah Se-Jawa Tengah. Penelitian yang dilakukan oleh Jumania Septariani (2019) yang berjudul "Analisis Efektifitas Penggunaan Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Dalam Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin" yang menunjukkan bahwa prinsip penganggaran berbasis kinerja di Dinas Sosial

---

Kabupaten Musi Banyuasin menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas masih kurang baik, namun disiplin anggaran dan keadilan anggaran sudah cukup baik. Keefektifan penggunaan belanja langsung dalam pelaksanaan kinerja berbasis anggaran. Berdasarkan rasio efektivitas penggunaan anggaran dinas sosial kabupaten Musi Banyuasin tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 memiliki kriteria efektif dan dari tahun ke tahun efektifnya ditingkatkan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.

### **Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 29 Kabupaten dan 6 Kota. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini mempunyai kriteria yaitu Dinas Sosial yang mempunyai data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial pada Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan Fakir Miskin, Alokasi Anggaran Kesejahteraan Sosial dan Dinas Sosial yang mempublikasikan Laporan Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk periode 2019-2022.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Data penelitian ini diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan pada website Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2022.

### **Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data yang digunakan penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder yang diperoleh dari situs resmi pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah ([www.dinsos.jatengprov.go.id](http://www.dinsos.jatengprov.go.id)). Data diambil berdasarkan keperluan dalam penelitian berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial dan Laporan Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data penelitian yang berisi informasi tentang subjek, objek, atau peristiwa yang telah diproses, diverifikasi, dikutip, direkam, dan diarsipkan selama penelitian (Darmawan, 2014). Data yang dianalisis bersumber dari situs resmi pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah ([www.dinsos.jatengprov.go.id](http://www.dinsos.jatengprov.go.id)). Data diambil berdasarkan keperluan dalam penelitian berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial dan Laporan Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

### **Pengukuran Variabel**

Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan Fakir Miskin Diukur dengan menggunakan realisasi anggaran bidang penanggulangan fakir miskin yang diambil dari laporan kinerja instansi pemerintah dinas sosial (LKJIP). Alokasi

Anggaran Kesejahteraan Sosial diukur dengan menggunakan realisasi anggaran kesejahteraan sosial yang diambil dari laporan kinerja instansi pemerintah dinas sosial (LKJIP). Kinerja Dinas Sosial diukur dengan menggunakan capaian kinerja dinas sosial yang diambil dari laporan kinerja instansi pemerintah dinas sosial (LKJIP).

### Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana, dengan melalui uji asumsi klasik berupa uji normalitas dan uji heteroskedastisitas serta pengujian hipotesis melalui uji parsial dan koefisien regresi menggunakan *software* SPSS Versi 20.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Statistik deskriptif untuk variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Statistik Deskriptif**  
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan Fakir Miskin	40	2630000000,00	51840000000,00	15221885556,6750	10970840928,00028
Alokasi Anggaran Kesejahteraan Sosial Kinerja Dinas Sosial	40	650946672,00	30500000000,00	9682785826,6500	7004936873,42155
Penanggulangan Kemiskinan Kinerja Dinas Sosial	40	70,36	99,41	88,6263	7,89667
Peningkatan Kesejahteraan Sosial	40	72,20	100,00	89,0423	8,41039
Valid N (listwise)	40				

Pada tabel 3 menunjukkan nilai statistik deskriptif dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

- Untuk variabel Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan Fakir Miskin dengan jumlah data 40, diketahui memiliki nilai minimum sebesar 2.630.000, nilai maksimum sebesar 51.840.000, nilai rata-rata sebesar 15.221 dengan standar deviasi 10.970,028. Karena nilai mean lebih besar dari standar deviasi maka hasil tersebut dinyatakan baik. Hal ini dikarenakan standar deviasi yang mencerminkan penyimpangan dari variabel Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan Fakir Miskin tersebut lebih kecil dari mean.
- Untuk variabel Alokasi Anggaran Kesejahteraan Sosial dengan jumlah data 40, diketahui memiliki nilai minimum sebesar 650.946, nilai maksimum sebesar 30.500.000, nilai rata-rata sebesar 96.827 dengan standar deviasi 70.049,42. Karena nilai mean lebih besar dari standar deviasi maka hasil tersebut dinyatakan baik. Hal ini dikarenakan standar deviasi yang mencerminkan penyimpangan dari variabel Alokasi Anggaran Kesejahteraan Sosial tersebut lebih kecil dari mean.

- c. Untuk variabel Kinerja Dinas Sosial Penanggulangan Kemiskinan dengan jumlah data 40, diketahui memiliki nilai minimum sebesar 70,36, nilai maksimum sebesar 99,41, nilai rata-rata sebesar 88,626 dengan standar deviasi 7,896. Karena nilai mean lebih besar dari standar deviasi maka hasil tersebut dinyatakan baik. Hal ini dikarenakan standar deviasi yang mencerminkan penyimpangan dari variabel Kinerja Dinas Sosial Penanggulangan Fakir Miskin tersebut lebih kecil dari mean.
- d. Untuk variabel Kinerja Dinas Sosial Peningkatan Kesejahteraan Sosial dengan jumlah data 40, diketahui memiliki nilai minimum sebesar 72,20, nilai maksimum sebesar 100, nilai rata-rata sebesar 89,04 dengan standar deviasi 8,410. Karena nilai mean lebih besar dari standar deviasi maka hasil tersebut dinyatakan baik. Hal ini dikarenakan standar deviasi yang mencerminkan penyimpangan dari variabel Kinerja Dinas Sosial Peningkatan Kesejahteraan Sosial tersebut lebih kecil dari mean.

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

Berikut hasil uji normalitas berdasarkan *One Sample Kolmogorov Smirnov Test* adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	7,78207204
Most Extreme Differences	Absolute	,107
	Positive	,077
	Negative	-,107
Test Statistic		,107
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel 4 hasil uji normalitas dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, diperoleh nilai signifikansi (Asymp.Sig 2-tailed) 0.200 atau 20 %. Nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 atau 5 % (0,200 > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

**Tabel 5 Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	7,85475529
Most Extreme Differences	Absolute	,152
	Positive	,079
	Negative	-,152
Test Statistic		,152
Asymp. Sig. (2-tailed)		,021 <sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan tabel 5 hasil uji normalitas dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, diperoleh nilai signifikansi (Asymp.Sig 2-tailed) 0.02 atau 2% . Nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 atau 5 % ( $0,200 < 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal.

**Tabel 6 Uji Normalitas (Monte Carlo)**  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		40	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	7,85475529	
Most Extreme Differences	Absolute	,152	
	Positive	,079	
	Negative	-,152	
Test Statistic		,152	
Asymp. Sig. (2-tailed)		,021 <sup>c</sup>	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	,283 <sup>d</sup>	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,272
		Upper Bound	,295

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Berdasarkan tabel 6 hasil uji normalitas dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, diperoleh nilai signifikansi (Monte Carlo Sig. 2-tailed) 0.283 atau 28% . Nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 atau 5 % ( $0,283 > 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

#### Uji Heteroskedastisitas

Berikut hasil dari uji heteroskedastisitas menggunakan Scatterplot dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 7 Uji Heteroskedastisitas**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	30,388	19,927		1,525	,136
Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan Fakir Miskin	-1,028	,859	-,191	-1,196	,239

a. Dependent Variable: ABSOLUT\_RES

Berdasarkan tabel uji 7 heteroskedastisitas (uji Glejser) diketahui bahwa nilai signifikan  $> 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

**Tabel 8 Uji Heteroskedastisitas**  
Coefficients<sup>a</sup>

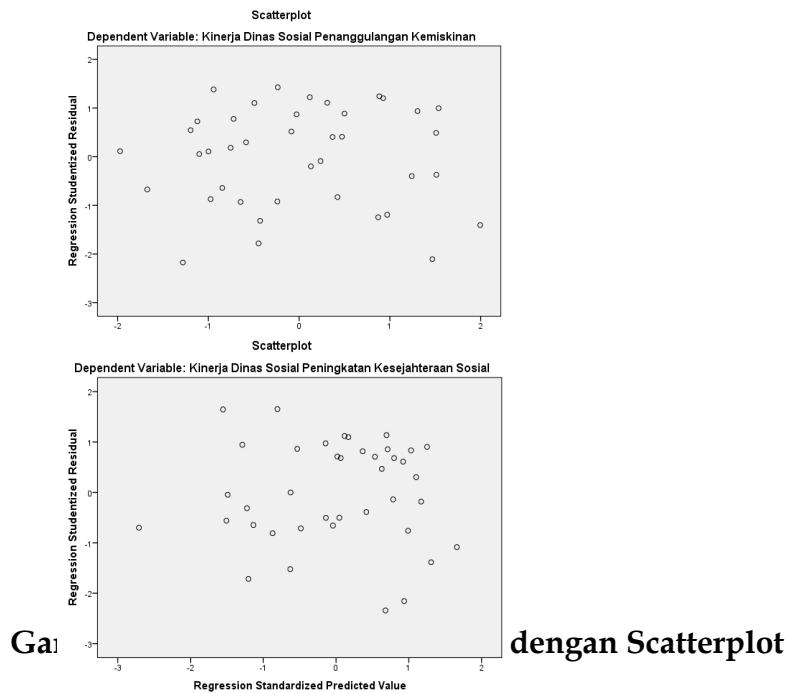
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,264	17,109		,074	,941



Alokasi Anggaran Kesejahteraan Sosial	,236	,754	,051	,313	,756
---------------------------------------	------	------	------	------	------

a. Dependent Variable: ABSOLUT\_RES2

Berdasarkan tabel 8 uji heteroskedastisitas (uji Glejser) diketahui bahwa nilai signifikan  $> 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Berikut hasil dari uji heteroskedastisitas menggunakan Scatterplot dengan hasil sebagai berikut:



Berdasarkan gambar 2 hasil uji heteroskedastisitas terlihat pada scatterplot dalam suatu grafik tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dari persamaan model regresi tersebut layak digunakan dikarenakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Analisis Regresi Linier Sederhana

**Tabel 9 Analisis Regresi Linier Sederhana**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	130,001	38,987		3,335	,002
	Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan Fakir Miskin	-1,784	1,680	-,170	-1,062	,295

a. Dependent Variable: Kinerja Dinas Sosial Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan tabel 9 hasil analisis regresi linier sederhana diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$KDSPK = 130,001 - 1,784 AABPFM + e$$

Keterangan :

KDSPK = Kinerja Dinas Sosial Penanggulangan Fakir Miskin

AABPFM = Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan Fakir Miskin

e = Error

- Nilai konstanta (a) adalah sebesar 130,001, artinya jika variabel independen Alokasi Anggaran Bidang penanggulangan Fakir Miskin dianggap konstan atau nol (0), maka Kinerja Dinas Sosial Penanggulangan Kemiskinan adalah sebesar 130,001.
- Nilai koefisien dari Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan Fakir Miskin sebesar -1,784, nilai tersebut menunjukkan pengaruh yang negatif (berlawanan arah) antara Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan Fakir Miskin dan Kinerja Dinas Sosial Penanggulangan Kemiskinan. Hal ini mempunyai arti jika Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan Fakir Miskin mengalami peningkatan sebesar 1%, maka Kinerja Dinas Sosial Penanggulangan Kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 1,784.

**Tabel 10 Analisis Regresi Linier Sederhana**

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11,614	32,842		,354	,726
	Alokasi Anggaran Kesejahteraan Sosial	3,414	1,447	,357	2,359	,024

a. Dependent Variable: Kinerja Dinas Sosial Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan tabel 10 hasil analisis regresi linier sederhana diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$KDSPK = 11,614 + 3,414 AAKS + e$$

Keterangan :

KDSPKS = Kinerja Dinas Sosial Peningkatan Kesejahteraan Sosial

AAKS = Alokasi Anggaran Kesejahteraan Sosial

e = Error

- Nilai konstanta (a) adalah sebesar 11,614, artinya jika variabel independen Alokasi Anggaran Kesejahteraan Sosial dianggap konstan atau nol (0), maka Kinerja Dinas Sosial Peningkatan Kesejahteraan Sosial adalah sebesar 11,614.
- Nilai koefisien dari Alokasi Anggaran Kesejahteraan Sosial sebesar 3,414 mempunyai arti bahwa jika Alokasi Anggaran Kesejahteraan Sosial mengalami peningkatan, maka Kinerja Dinas Sosial Peningkatan Kesejahteraan Sosial akan meningkat sebesar 3,414.

Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Parsial (uji t)

**Tabel 11 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	130,001	38,987		3,335	,002
	Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan Fakir Miskin	-1,784	1,680	-,170	-1,062	,295

a. Dependent Variable: Kinerja Dinas Sosial Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

Variabel Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan Fakir Miskin mempunyai nilai t hitung sebesar -1,062 lebih kecil dari t tabel 2.2024 dengan signifikansi sebesar 0,295 (lebih dari 0,05). Dari hasil perhitungan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama **ditolak** atau Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan Fakir Miskin Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Dinas Sosial Penanggulangan Kemiskinan.

**Tabel 12 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11,614	32,842		,354	,726
	Alokasi Anggaran Kesejahteraan Sosial	3,414	1,447	,357	2,359	,024

a. Dependent Variable: Kinerja Dinas Sosial Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

Variabel Alokasi Anggaran Kesejahteraan Sosial mempunyai nilai t hitung sebesar 2,359 lebih besar dari t tabel 2.024 dengan signifikansi sebesar 0,024 (kurang dari 0,05). Dari hasil perhitungan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua **diterima**, yaitu Alokasi Anggaran Kesejahteraan Sosial Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Dinas Sosial Peningkatan Kesejahteraan Sosial.

### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 13 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,170 <sup>a</sup>	,029	,003	7,88380	1,314

a. Predictors: (Constant), Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan Fakir Miskin

b. Dependent Variable: Kinerja Dinas Sosial Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan tabel 13 hasil perhitungan diketahui bahwa koefisien determinasi pada model diperoleh sebesar 0.029. Hal ini berarti 0,29% Kinerja Dinas Sosial Penanggulangan Kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel independen pada penelitian ini, sedangkan sisanya 99,71% yaitu Kinerja Dinas Sosial Penanggulangan Kemiskinan dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti Alokasi Anggaran Pemberdayaan Perempuan, Alokasi Anggaran Perlindungan Anak Terlantar, Alokasi Anggaran Penyandang Disabilitas, Alokasi Anggaran Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, Alokasi Anggaran Penanganan Rehabilitasi Korban Bencana Alam dan lain-lain.

**Tabel 14 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,357 <sup>a</sup>	,128	,105	7,95744	2,154

a. Predictors: (Constant), Alokasi Anggaran Kesejahteraan Sosial

b. Dependent Variable: Kinerja Dinas Sosial Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan tabel 14 hasil perhitungan diketahui bahwa koefisien determinasi pada model diperoleh sebesar 0.128. Hal ini berarti 12,8% Kinerja Dinas Sosial Peningkatan Kesejahteraan Sosial dapat dijelaskan oleh variabel independen pada penelitian ini, sedangkan sisanya 87,2% yaitu Kinerja Dinas Sosial Peningkatan Kesejahteraan Sosial dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti Alokasi Anggaran Pemberdayaan Perempuan, Alokasi Anggaran Perlindungan Anak Terlantar, Alokasi Anggaran Penyandang Disabilitas, Alokasi Anggaran Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, Alokasi Anggaran Penanganan Rehabilitasi Korban Bencana Alam dan lain-lain.

## Pembahasan

### Pengaruh Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan Fakir Miskin Terhadap Kinerja Dinas Sosial Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan hasil uji signifikansi parsial, nilai t hitung sebesar -1,062 lebih kecil dari t tabel (2.024) dengan signifikansi sebesar 0,295 (lebih dari 0,05). Dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan Fakir Miskin berpengaruh terhadap Kinerja Dinas Sosial Penanggulangan Kemiskinan **ditolak**.

Indikator utama dari kinerja dinas sosial penanggulangan kemiskinan tidak hanya terkait alokasi anggaran yang ditetapkan, namun juga dilihat dari fungsi alokasi anggaran tersebut digunakan untuk apa, seperti fasilitas kebutuhan fakir miskin di daerah pedesaan dan perkotaan yang berbeda. Dengan demikian alokasi anggaran bidang penanggulangan fakir miskin tidak berdampak pada kinerja dinas sosial penanggulangan kemiskinan jika salah satu program yang terkait melebihi target.

Jumlah Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan Fakir Miskin yang diperoleh Dinas Sosial Pemerintah Daerah tidak mempengaruhi Kinerja Dinas Sosial Penanggulangan Kemiskinan. Bukti empiris yang mendukung bahwa Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan Fakir Miskin tidak berpengaruh terhadap Kinerja Dinas Sosial Penanggulangan Kemiskinan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 15 AABPFM dan KDSPK**

Kabupaten/kota	AABPFM		KDSPKS	
	2019	2020	2019	2020
Kabupaten Purworejo	12.550	12.030	93	93
Kota Salatiga	3.710	5.870	99	99
Kota Semarang	14.050	10.780	98	98

Tabel 15 merupakan realisasi Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan Fakir Miskin dan Kinerja Dinas Sosial Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Pada Kabupaten Purworejo realisasi Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan Fakir Miskin tahun 2019 sebesar Rp. 12,5 Miliar dan tahun 2020 sebesar Rp. 12 Miliar. Sedangkan untuk realisasi Kinerja Dinas Sosial Penanggulangan Kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 93% dan tahun 2020 sebesar 93%. Pada Kota Salatiga realisasi Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan Fakir Miskin tahun 2019 sebesar Rp. 3,7 Miliar dan tahun 2020 sebesar Rp. 5,8 Miliar. Sedangkan untuk realisasi Kinerja Dinas Sosial Penanggulangan Kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 99% dan tahun 2020 sebesar 99%. Pada Kota Semarang realisasi Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan Fakir Miskin tahun 2019 sebesar Rp. 14 Miliar dan tahun 2020 sebesar Rp. 10,7 Miliar. Sedangkan untuk realisasi Kinerja Dinas Sosial Penanggulangan Kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 98% dan tahun 2020 sebesar 98%. Terlihat bahwa Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan Fakir Miskin Kabupaten Purworejo pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan sedangkan Kinerja Dinas Sosial Penanggulangan Kemiskinan pada tahun 2019-2020 masih tetap. Pada Kota Salatiga Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan Fakir Miskin tahun 2019-2020 mengalami peningkatan sedangkan Kinerja Dinas Sosial Penanggulan Kemiskinan pada tahun 2019-2020 masih tetap. Pada Kota Semarang Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan Fakir Miskin tahun 2019-2020 mengalami penurunan sedangkan Kinerja Dinas Sosial Penanggulangan Kemiskinan pada tahun 2019-2020 masih tetap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan Fakir Miskin **Tidak Berpengaruh** terhadap Kinerja Dinas Sosial Penanggulangan Kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jaine Christin Andu, Herman Nayoan (2022) dan Muhammad Guntur (2022). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa

Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan Fakir Miskin tidak berpengaruh terhadap Kinerja Dinas Sosial.

### **Pengaruh Alokasi Anggaran Kesejahteraan Sosial Terhadap Kinerja Dinas Sosial Peningkatan Kesejahteraan Sosial**

Berdasarkan hasil uji signifikansi parsial, nilai  $t$  hitung sebesar 2.359 lebih besar dari  $t$  tabel (2.024) dengan signifikansi sebesar 0,024 (kurang dari 0,05). Dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Alokasi Anggaran Kesejahteraan Sosial berpengaruh terhadap Kinerja Dinas Sosial Peningkatan Kesejahteraan Sosial **diterima**.

Menurut UU No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, alokasi anggaran kesejahteraan sosial adalah anggaran yang digunakan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Alokasi anggaran kesejahteraan sosial yang tepat dapat menjadi salah satu indikator dalam pencapaian kinerja pada dinas sosial. Hubungan alokasi anggaran kesejahteraan sosial terhadap kinerja Dinas Sosial yaitu dengan adanya alokasi anggaran kesejahteraan sosial dapat menunjang kinerja Dinas Sosial dalam menjalankan tugasnya sehingga sumber daya dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat di daerah masing-masing dan berdasarkan target yang telah disepakati. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila alokasi anggaran kesejahteraan sosial tinggi maka kinerja dinas sosial akan naik dalam arti kinerja dinas sosial dapat melakukan tugasnya dengan baik sehingga dinas sosial dapat melaksanakan tugasnya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

Bukti empiris yang mendukung bahwa Alokasi Anggaran Kesejahteraan Sosial berpengaruh terhadap Kinerja Dinas Sosial Peningkatan Kesejahteraan Sosial pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 16 AAKS dan KDSPKS**

Kabupaten/kota	AAKS				KDSPKS			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
kabupaten Banjarnegara	2.275	4.420	6.230	8.210	92	94	96	98
kabupaten kebumen	30.500	22.340	16.120	12.860	86	82	75	73
kabupaten purworejo	7.360	10.200	14.100	15.910	85	87	90	96
kabupaten sukoharjo	12.300	14.270	17.520	21.280	94	97	98	99

Tabel 16 merupakan realisasi Alokasi Anggaran Kesejahteraan Sosial dan Kinerja Dinas Sosial Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota di Jawa

---

Tengah tahun 2019-2022. Pada Kabupaten Banjarnegara realisasi Alokasi Anggaran Kesejahteraan Sosial tahun 2019 sebesar Rp. 2,2 Miliar, tahun 2020 sebesar Rp. 4,4 Miliar, kemudian pada tahun 2021 sebesar Rp. 6,3 Miliar dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 8,2 Miliar. Sedangkan untuk realisasi Kinerja Dinas Sosial Peningkatan Kesejahteraan Sosial pada tahun 2019 sebesar 92%, tahun 2020 sebesar 94%, kemudian pada tahun 2021 sebesar 96% dan pada tahun 2022 sebesar 98% . Pada Kabupaten Kebumen realisasi Alokasi Anggaran Kesejahteraan Sosial tahun 2019 sebesar Rp. 30,5 Miliar, tahun 2020 sebesar Rp. 22,3 Miliar, kemudian pada tahun 2021 sebesar Rp. 16,1 Miliar dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 12,8 Miliar. Sedangkan untuk realisasi Kinerja Dinas Sosial Peningkatan Kesejahteraan Sosial pada tahun 2019 sebesar 86% tahun 2020 sebesar 82%, kemudian pada tahun 2021 sebesar 75% dan pada tahun 2022 sebesar 73%. Pada Kabupaten Purworejo realisasi Alokasi Anggaran Kesejahteraan Sosial tahun 2019 sebesar Rp. 7,3 Miliar, tahun 2020 sebesar Rp. 10,2 Miliar, kemudian pada tahun 2021 sebesar Rp. 14,1 Miliar dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 15,9 Miliar. Sedangkan untuk realisasi Kinerja Dinas Sosial Peningkatan Kesejahteraan Sosial pada tahun 2019 sebesar 85% tahun 2020 sebesar 87%, kemudian pada tahun 2021 sebesar 90% dan pada tahun 2022 sebesar 96% . Pada Kabupaten Sukoharjo realisasi Alokasi Anggaran Kesejahteraan Sosial tahun 2019 sebesar Rp. 12,3 Miliar, tahun 2020 sebesar Rp. 14,2 Miliar, kemudian pada tahun 2021 sebesar Rp. 17,5 Miliar dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 21,2 Miliar. Sedangkan untuk realisasi Kinerja Dinas Sosial Peningkatan Kesejahteraan Sosial pada tahun 2019 sebesar 94% tahun 2020 sebesar 97%, kemudian pada tahun 2021 sebesar 98% dan pada tahun 2022 sebesar 99%. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila Alokasi Anggaran Kesejahteraan Sosial mengalami kenaikan maka akan diikuti kenaikan Kinerja Dinas Sosial Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan apabila Alokasi Anggaran Kesejahteraan Sosial mengalami penurunan maka akan diikuti penurunan Kinerja Dinas Sosial Peningkatan Kesejahteraan Sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Alokasi Anggaran Kesejahteraan Sosial **Berpengaruh** terhadap Kinerja Dinas Sosial Peningkatan Kesejahteraan Sosial. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dyah Hariani (2021), dan Muhammad Danang Wicaksono, Hartawan, Agus Tiansah (2022) . Hasil tersebut menunjukkan bahwa Alokasi Anggaran Kesejahteraan Sosial berpengaruh terhadap Kinerja Dinas Sosial.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

### Saran

Diharapkan penelitian selanjutnya bisa lebih mendetail mengenai analisis Kinerja Dinas Sosial dalam menanggulangi kemiskinan dan peningkatan

---

kesejahteraan sosial di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan data dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Sosial sehingga bisa ditemukan hasil penelitian yang lebih spesifik.

## REFERENSI

- Abdurahman. (2019). The Relationship between job satisfaction, work-life balance and organizational commitment on employee performance.
- Ais, R. (2022). Pengaruh Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan Fakir Miskin Terhadap Kinerja Dinas Sosial Pada Pemerintah Daerah Se-Jawa Tengah Tahun 2018-2020. *Jurnal Ilmiah Neraca FEB-UMPP*.
- Alviyanzah, F. (2019). *Pembangunan nasional yang berhasil apabila pemerintah dan masyarakat saling bersinergi dalam proses pembangunan, termasuk di bidang kesejahteraan sosial untuk menanggulangi kemiskinan*. 2019.
- Chalil, Z. F. (2009). Efektifitas Penanggulangan Fakir Miskin. In Z. F. Chalil, *Efektivitas Penanggulangan Fakir Miskin*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009.
- Gillin, G. d. (2022, maret jum'at). *Definisi Kemiskinan*. Retrieved from Definisi Kemiskinan, atmago.com: <https://www.atmago.com/sosial/kemiskinan/definisi-kemiskinan>
- Hasanah, N. M. (2019). "Peranan Pemerintah Kota Jambi Terhadap pengentasan kemiskinan melalui program UEP (Usaha Ekonomi Produktif) dan KUBE (Kelompok Usaha Bersama). *the influnce of budget allocations for poverty alleviation*.
- Kholidah, N., & Hakim, M. R. (2021). Analysis of zakat empowerment in the era of pandemy COVID-19 towards impossible material and spiritual aspects Mustahik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1653-1662.
- Kholidah, N., & Salma, A. N. (2019). Filantropi kreatif: Pemberdayaan ekonomi umat berbasis zakat produktif pada program 1000 UMKM LAZISMU Kabupaten Pekalongan. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 14(2), 93-101.
- Mangkunegara. (2017). The Impact of Work Stress and the Work Environment in the Organization: How Job Satisfaction Affects Employee Performance? *Journal of Human Resource and Sustainability Studies*.
- Risgiyanti, R., & Hidayah, R. (2020). The role of workplace spirituality in reducing the negative impact of organizational cynicism on job performance. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 18(4), 692-703.
- Riswan, R., Suyono, E., & Mafudi, M. (2017). Revitalization model for village unit cooperative in Indonesia.
- Sosial, W. D. (2022, Februari Kamis). *Dinas Sosial*. Retrieved from Dinas Sosial.
- Suyono, E., Farooque, O. A., & Riswan, R. (2016). Toward a model of traditional retailers and sellers empowerment in improving competitiveness against modern markets in Banyumas region, Indonesia. *DLSU Business and Economics Review*, 25(2), 147-165.



